

Kerja Sama *United Nations Fund For Population Activity* Dan *The National Council For Women* Terkait Proyeksi Pemerintah Mesir Dalam Menghentikan *Female Genital Mutilation* Di Tahun 2030

Rusdi J. Abbas¹, Viraya A. Khairina²

Universitas Pertamina

Rusdi.jarwo.abbas@gmail.com¹, virayaathiyya03@gmail.com²

Abstract

United Nations Fund for Population Activity (UNFPA) became one of the international organizations that is active in giving aid to help social and gender issues such as Female Genital Mutilation (FGM). The Egypt government itself has made regulations related to the prohibition of FGM that clearly resulted giving the negative impact on women, such as on health sector and women's rights regarding private affairs. The presence of UNFPA and NCW is expected to be able to suppress and reduce the potential growth of FGM cases through the cooperation. With concerns related to gender inequality and misogyny, through this study, this analysis will be using the theory of liberal feminism and the International Organization Theory as the basis regarding to UNFPA – NCW's efforts in supporting the Egyptian Government's project to eliminate FGM in Egypt by 2030. This research will use qualitative method including document-based research and interview with Hala Yousry as the professor of rural sociology and as Vice Head of Rural Women Committee at the NCW This research is expected to be able to increase readers' awareness of the impact of FGM and how the international organizations and the country's government combating the specific issue.

Keywords: FGM, Egypt, Liberal Feminism, International Organization Theory, UNFPA, NCW

Abstrak

United Nations Fund for Population Activity (UNFPA) menjadi salah satu organisasi internasional yang aktif memberikan bantuan untuk membantu isu-isu sosial dan gender seperti Mutilasi Genital Perempuan (FGM). Pemerintah Mesir sendiri telah membuat regulasi terkait larangan sunat perempuan yang jelas berdampak negatif pada perempuan, seperti pada sektor kesehatan dan hak-hak perempuan terkait urusan pribadi. Kehadiran UNFPA dan NCW diharapkan mampu menekan dan mengurangi potensi pertumbuhan kasus FGM melalui kerja sama tersebut. Dengan kekhawatiran terkait ketimpangan gender dan misogini, melalui penelitian ini, analisis ini akan menggunakan teori feminism liberal dan Teori Organisasi Internasional sebagai dasar terkait upaya UNFPA – NCW dalam mendukung proyek Pemerintah Mesir untuk menghapuskan FGM di Mesir pada tahun 2030. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif termasuk penelitian berbasis dokumen dan wawancara dengan Hala Yousry selaku guru besar sosiologi pedesaan dan sebagai Wakil Ketua Komite Perempuan Pedesaan di NCW. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pembaca tentang dampak sunat perempuan dan bagaimana organisasi internasional dan pemerintah negara memerangi masalah spesifik tersebut.

Kata kunci: FGM, Mesir, Feminisme Liberal, UNFPA, NCW

PENDAHULUAN

United Nations Fund for Population Activity (UNFPA) merupakan substansi dari United Nations (UN) yang beroperasi di tahun 1969, berfokus menyebarluaskan edukasi

terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak, serta terkait hak kebebasan akan tubuh mereka (UNFPA, 2023). Melalui kerja sama yang dibentuk oleh UNFPA bersama mitra kerja samanya seperti Kementerian Kesehatan Mesir, *Non Governmental Organizations* (NGO), Dewan Nasional Ibu dan Anak, serta *National Council for Women* (NCW) tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi kesenjangan dan kekerasan gender di wilayah Mesir sesuai dengan yang tertulis dalam *Egypt's Vision 2030*.

Keterlibatan UNFPA di Mesir membuka peluang untuk meningkatkan aspek sosial lainnya oleh sebab hal ini belum menjadi perhatian penuh dari Pemerintah Mesir, seperti sistem edukasi yang belum merata, masih terdapat sensitivitas pada topik yang dianggap tabu, lemahnya regulasi pemerintah terkait layanan masyarakat yang mengarah pada kalangan usia muda (Family Health International, 2009). Pada perkembangannya di tahun 2014, Mesir menciptakan deklarasi bernama *Addis Ababa Declaration on Population and Development* yang juga menjadi keseriusan Pemerintah Mesir mengenai komitmennya untuk mewujudkan visi dan misinya terkait nol FGM di tahun 2030. Komitmen tersebut didasari oleh banyaknya praktik FGM yaitu pengangkatan area luar kelamin perempuan yang sebagian besar terjadi di wilayah Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan Sri Lanka dan wilayah Afrika Utara, yakni Mesir. Secara umum, tipe 3 ini menjadi praktik yang mendominasi di kalangan perempuan di Mesir dan pemberlakuan tipe praktik tersebut didukung oleh tradisi dan budaya yang secara umum menyebar di wilayah Afrika Utara.

Saat ini, lebih dari 200 juta perempuan dalam rentang umur 15 hingga 49 tahun telah mengalami praktik tersebut yang mayoritas tersebar di wilayah Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Utara (WHO, 2023). Melihat dalam kawasan Afrika terdapat setidaknya tiga negara dengan kasus FGM tertinggi; Pertama, Somalia dengan total korban sebesar 99.2% dari 8,78 juta total penduduk perempuan. Kedua, Djibouti menjadi negara dengan total kasus FGM sebesar 93% dari sekitar 560 ribu total penduduk perempuan. Ketiga, dengan berfokus pada FGM di wilayah Mesir lebih tepatnya di tahun 2017, kasus FGM di Mesir menduduki peringkat ketiga di wilayah Afrika dengan jumlah kasus sebesar 86% dari 55 juta total penduduk perempuan di kisaran usia 15-49 tahun.¹ Dari total kasus FGM yang ada, kegiatan

¹ Diolah dari berbagai sumber:

Knomea, *Egypt – Female Population*, 2023

Statista, *Somalia: Total Population from 2012 to 2022, by gender*, 2024

Statista, *Djibouti: Total population from 2012 to 2022, by gender*, 2024

tersebut dilakukan tanpa adanya *consent* atau persetujuan dari perempuan yang menjadi objek.

Untuk menekan dan menghentikan praktik FGM, Mesir telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms Against Women* (CEDAW) di tahun 1981. Dengan terratifikasinya konvensi tersebut, menjadi tanda bahwa pemerintah Mesir menyadari serta melihat bahaya yang dihasilkan dari FGM. Negara tersebut memiliki hukum nasional atau *domestic laws* terkait praktik FGM seperti Hukum Anak No. 12 Tahun 1996² dan Hukum NO. 30 Tahun 2018³. Tidak hanya itu, di tahun 2008 Pemerintah Mesir menggolongkan FGM sebagai tindakan kriminal dan ada sanksi yang diberikan kepada pelaku atau orang yang masih menjalankan praktik ini.

Pemerintah Mesir turut membentuk lembaga bernama The National Council for Women (NCW) sesuai dengan dekrit presiden No. 90/2000 yang bersama dengan UNFPA memproyeksikan upaya pengentasan FGM di tahun 2030 melalui program yang ditujukan pada hak dan hidup perempuan (National Council for Women, 2020). Penghentian praktik FGM bukanlah hal mudah untuk diselesaikan dalam waktu singkat mengingat kasus ini telah mengakar serta menjadi sebuah budaya. Jika melihat pada aspek historis, ada pihak yang berpendapat bahwa FGM berasal dan berakar dari nenek moyang terdahulu, bahkan ada yang memiliki pandangan bahwa FGM berasal dari Yunani (Tag-Eldin, Gadallah, & Al-Tayeb, 2008), serta praktik FGM dilakukan semata-mata untuk melindungi perempuan dari tindakan asusila (Llamas, 2017).

Kehadiran NCW sebagai dewan nasional yang salah satu tugasnya adalah menjamin kesetaraan dan hak perempuan dinilai dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan Negara Mesir yang bebas dari FGM di tahun 2030. Perempuan Mesir hidup di bawah sistem sosial yang didominasi oleh patriarki dan NCW memposisikan dirinya di antara masyarakat dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Proses tersebut juga diharapkan membentuk pola integrasi dalam kemajuan perempuan. Integrasi dapat dicapai dengan mempertimbangkan keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam kata lain, hal tersebut berada di dalam satu wadah yang menitikberatkan pada kondisi kehidupan perempuan (Omar & Taha, 2021). Dalam pernyataan Maya Morsy sebagai

² United Nations Development Programme, *Egypt: Gender Justice & The Law, 2018*
Hukum terkait perlindungan dan kebebasan pada setiap anak

³ *Ibid.*
Hukum terkait regulasi *National Council for Women* sebagai lembaga nasional yang berfokus pada perempuan

presiden NCW memfokuskan agenda kerjanya pada pemberdayaan perempuan di rentang usia 10-19 tahun (UNFPA Egypt, 2022). Karena direntang umur tersebut merupakan golongan umur dengan kasus FGM tertinggi⁴. Penelitian ini akan dikaji melalui sudut pandang feminism liberal dan teori organisasi internasional dalam melihat upaya UNFPA – NCW dan pemerintah Mesir untuk menghentikan FGM di tahun 2030.

Penting dilakukannya penelitian ini guna memahami secara spesifik dan menyeluruh terkait praktik FGM yang terjadi di Mesir sehingga dapat memberikan *insight* atau pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitian penulis mengingat masih cukup relevan dengan sistem patriarki di negara tersebut. Dengan melihat dari peran UNFPA dan NCW juga menjadi keterbaruan dari penelitian penulis yang kemudian dikaji melalui teori feminism liberal dan teori organisasi internasional

METODE

Dalam studi Hubungan Internasional, topik pembahasan yang beragam menentukan jenis metode yang ada. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang merujuk pada sistematika penulisan Creswell yang dimana metode ini melibatkan peneliti untuk mendalami isu yang dikaji sehingga dalam proses pengumpulan data memudahkan peneliti dalam mengkaji data, meneliti permasalahan, hingga dilakukannya wawancara kepada partisipan. Wawancara yang dilakukan juga memberikan gambaran atau ilustrasi terkait peristiwa yang terjadi (Creswell, 2018). Penelitian akan bersifat deduktif yang dimulai dengan melihat studi kasus yakni FGM dan berfokus pada upaya-upaya yang kemudian dilakukan oleh UNFPA dan NCW. Sumber literatur juga digunakan sebagai penguatan argumen yang kemudian akan menjawab pertanyaan penelitian terkait fenomena di dalam lingkup Hubungan Internasional – terlebih permasalahan mengenai isu gender, dalam hal ini praktik FGM.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan Hala Yousry sebagai sebagai *professor of rural sociology* dan juga merupakan *Vice Head of Rural Women Committee* di NCW dalam mendapatkan data primer dan juga melakukan *document based research* melalui beberapa publikasi seperti buku karya Baylis, Smith, dan Owens dengan judul *The Globalization of World Politics* pada bagian *Feminism*, jurnal karya Amel Fahmy, Mawaheb, dan Ahmed dengan judul *Female Genital Mutilation/Cutting and Issues of*

⁴ Rentang usia dan persentasi kasus FGM: (i) 15-19 tahun = 69,6%, (ii) 20-24 = 12%, (iii) 25-29 = 7,6%, (iv) 30-34 = 3,4%, (v) 35-39 = 2,8%, (vi) 40-44 = 0%, (vii) 45-49 = 1,7%.

Terkait hal ini, penulis akan membahasnya lebih lanjut di BAB II

Sexuality in Egypt, jurnal artikel yang ditulis oleh Dalal, Lawoko, dan Jansson dengan judul *Women's attitudes towards discontinuation of female genital mutilation in egypt*. Wawancara dan *document based research* dilakukan guna meningkatkan validitas dari sebuah informasi sehingga penelitian bersifat kredibel dan tidak bias.

KAJIAN TEORI

Teori Feminisme Liberal

Feminisme hadir sebagai perspektif dalam Hubungan Internasional yang pada dasarnya merupakan bentuk “perlawanan” dari teori realis yang menjunjung tinggi sifat anarki dan patriarki (Aydin, 2016). Gerakan feminism mulai muncul di awal tahun 1500-an sebagai tanda bahwa adanya pembatasan pada perempuan dalam memperjuangkan haknya (Hodgson-Wright, 2006). Gerakan feminism mengalami beberapa evolusi melalui tahapan-tahapan (*wave of feminism*). Evolusi tersebut memberikan fokusnya tersendiri terkait hal apa yang menjadi tujuan feminism di setiap era (Mohajan, 2022). Evolusi pertama (*first wave*) muncul di wilayah barat, yakni Inggris, dalam bentuk “protes” agar perempuan mendapatkan kesempatan pada sektor publik, utamanya pendidikan (Caughe, 2010). Lalu pada evolusi kedua (*Second wave*) ditandai dengan adanya gerakan yang menitikberatkan kepada norma yang mengacu pada gender (Wang, 2010). Evolusi ketiga (*Third wave*) mengacu pada “keberlanjutan” atau pengembangan dari evolusi kedua yang dinilai belum mencapai tujuannya. Sehingga di evolusi ketiga ini mulai menyinggung mengenai reproduksi perempuan dan hak perempuan lainnya (Iannello, 2010).

Dalam mengkaji fenomena sosial FGM yang berada di Mesir, penulis menggunakan teori feminism liberal dengan berdasar pada sudut pandang Naomi Wolf sebagai salah satu tokoh dari teori tersebut. Feminisme liberal yang merupakan hasil dari gerakan feminism gelombang ketiga (*third wave*) ini muncul pada abad ke-17 yang saat itu ditandai dengan adanya gerakan sosial yang menuntut negara demokrasi untuk menghapuskan kesenjangan atau diskriminasi berbasis gender dengan melalui adanya gerakan sosial mengingat penindasan berasal dari kurangnya hak perempuan pada sektor politik, ekonomi, sosial – terlebih sektor kesehatan (Cottais, 2020). Ketimpangan yang terjadi di ruang lingkup perempuan adalah dampak dari sistem patriarki yang mendominasi, sehingga nilai atau *value* yang membentuk perempuan juga berasal dari “kepercayaan” kaum laki-laki. Pada akhirnya konstruksi di dalam sistem sosial lah yang memengaruhi kebebasan perempuan. Dari awal perkembangannya, feminism liberal tidak bertujuan menimbulkan *gap*, tetapi menyamaratakan hak antara perempuan dengan laki-laki. Saat ini, pandangan terkait gender

telah terkonstruksi yang pada akhirnya menimbulkan adanya subordinasi (Brown, 1988). Subordinasi tersebut merupakan hambatan atau *barrier* pada aspek hak asasi manusia terlebih soal kebebasan.

Tekanan yang ditujukan kepada kaum perempuan adalah bentuk limitasi pada perempuan dalam aspek sosial yang meliputi kebebasan dalam hal pekerjaan, kebebasan dalam sektor edukasi, bahkan kebebasan mengenai organ reproduksinya. Hilangnya identitas dan berubahnya “ide” terkait tubuh perempuan adalah fenomena yang menimbulkan kontradiksi di dalam sistem sosial. Feminisme liberal hadir sebagai bentuk perlawanan dari konstruksi patriarki dan pandangan yang beranggapan perempuan adalah lemah dan juga sebagai penguat jika perempuan dan laki-laki adalah entitas dengan nilai yang sama. Negara yang didominasi oleh pemikiran yang mengarah kepada laki-laki perlahan menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan. Masalah tersebut juga menjadi roda bagi kaum feminism liberal untuk mendobrak dan meraih kembali kesempatan perempuan untuk “hidup”. Wolf juga melihat sejak tahun 1900-an dan hampir di setiap dekade, ada perubahan yang mengarah pada tuntutan perempuan seperti persoalan seksual, persoalan rumah tangga, hingga permasalahan mengenai bentuk tubuh. Dari rasa terasingkan tersebut, mulai muncul gerakan sosial ataupun *grassroot revolution* dalam mencapai kemerdekaannya dari opresi.

Kemerdekaan perempuan atas tubuhnya akan terus menjadi arah dan tujuan dari feminism liberal. Misogini⁵, tekanan, dan asumsi terkait “tidak sempurnanya” perempuan yang mayoritas berasal dari laki-laki menjadi dasar dari *counter* yang dilakukan oleh teori tersebut. Gerakan perubahan bermula dari lapisan bawah (masyarakat) yang kemudian perlahan memberikan pengaruh pada lapisan atas (pemerintah atau pemangku kebijakan) yang seharusnya mampu meminimalisir adanya disparitas dengan menitikberatkan pada sistem sosial (Becker, 1999). Seiring berjalannya waktu, gerakan sosial terkait gender mulai cukup dijumpai di beberapa negara, salah satunya Mesir. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan di negara tersebut adalah FGM. Amandemen terkait FGM telah ada sejak dibentuknya *The Egyptian Constitution* di tahun 2014, di sisi lain implementasinya belum dilakukan imbas dari sistem sosial dan kultur.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkorelasikan antara teori dengan fenomena sosial yang terjadi. Sistem sosial Mesir yang cenderung patriarki masih mendorong praktik FGM di ruang lingkup perempuan atas dasar tekanan sosial – dalam kata lain, tubuh perempuan ada dibawah kontrol ruang lingkup lingkungannya (Kingsley, 2015). Kegiatan

⁵ Rasa benci yang ditimbulkan pada kaum perempuan.

tersebut telah secara paksa merampas kepemilikan perempuan (organ tubuh; hak pada sistem reproduksinya) dan merelakannya untuk tetap bertahan hidup di wilayah dengan sistem patriarki yang masih melekat. Feminisme liberal mulai bergerak melalui NGO serta lembaga negara seperti NCW yang dibentuk atas dasar masifnya permasalahan *gap* pada gender di wilayah tersebut. Masyarakat Mesir – baik laki-laki ataupun perempuan, perlahan mulai memahami dampak dari praktik yang mengakar tersebut.

Teori Organisasi Internasional

Terbentuknya organisasi internasional menjadi tanda adanya upaya dari negara-negara dalam menyelesaikan masalah bersama seperti ekonomi, kesehatan, dan masalah sosial lainnya. Dalam memperdalam penelitian terkait FGM, penulis akan mengkaji peran UNFPA yang merupakan badan turunan dari UN melalui teori organisasi internasional berdasarkan sudut pandang Samuel Barkin. Menurutnya organisasi internasional merupakan wadah yang berisikan negara dengan kekuatan yang mampu menghasilkan daya tarik negara lainnya untuk bergabung dalam menyelesaikan isu kemanusiaan yang terjadi. Barkin turut menjabarkan setidaknya terdapat dua peran utama organisasi internasional dalam menyelesaikan isu kemanusiaan, diantaranya *humanitarian assistance* yang dibuktikan dengan pemberian bantuan kemanusiaan (*humanitarian aid*) dan *human rights protector* yang dapat dilihat pada upaya organisasi internasional dalam menyebarluaskan kepeduliannya terkait HAM (Barkin, 2006).

Organisasi internasional umumnya mengumpulkan dana dari negara anggota ataupun dengan mitra kerja samanya di negara yang dituju yang pada akhirnya, organisasi tersebut menjadi sebuah sistem yang saling memiliki keterkaitan antar satu sama lain. Barkin juga menyinggung mengenai kekuatan dari UN itu sendiri yang dimana kekuatan yang dihasilkan berasal dari negara anggota; bukan dari badan UN secara individu (Barkin, 2006).

UNFPA menjadi bagian dari salah satu cabang dari sistem UN yakni *General Assembly* yang merupakan badan utama dengan pembahasan yang cenderung lebih kompleks dan kegiatan utamanya adalah untuk menghasilkan resolusi dan badan yang berfokus di isu yang spesifik. Dengan hal ini, UNFPA juga cukup aktif dalam menyelesaikan isu sosial yang ada di hampir seluruh negara termasuk kasus FGM yang melanda negara Mesir. Mesir pada dasarnya memiliki hukum domestik terkait FGM pasca terratifikasi CEDAW yang murni berasal dari UN. Aturan dan kebijakan yang terbentuk juga menjadi dasar yang membentuk sistem di dalam ruang lingkup pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait upaya penghapusan kekerasan dan ketimpangan berbasis gender.

PEMBAHASAN

Permasalahan akan hak asasi manusia kerap terjadi di hampir seluruh dunia. Pada data yang diluncurkan UN di tahun 2022 dinyatakan terdapat sekitar 100 juta orang, termasuk anak-anak, kehilangan haknya yang ditandai dengan adanya paksaan untuk terlibat perang, kekerasan, persekusi, dan kekerasan seksual (United Nations, 2022). Diskriminasi telah menjadi permasalahan bersama yang berakar dari adanya struktur sosial yang didominasi oleh gender tertentu. Hakikatnya, perempuan dan anak-anak memerlukan ruang untuk dapat mengambil keputusan akan hidupnya dan terkait otonomi tubuh mereka; termasuk hak seksual dan reproduksi. Salah satu bentuk ketimpangan yang hingga saat ini masih menjadi pembahasan adalah praktik FGM. Praktik tersebut ditemukan di beberapa negara seperti Somalia, Djibouti, Sudan, dan Mesir yang pada dasarnya merupakan pelanggaran serius terkait hak asasi manusia. Melihat pada Mesir, negara ini menjadi “pusat” dari praktik FGM di Afrika Utara dengan total 84%. Jumlah tersebut juga menjadi perhatian pemerintah untuk menekan praktik tersebut.

Terkait peran UNFPA, organisasi ini hadir sebagai lembaga yang berfokus dalam mewujudkan kesetaraan gender dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi melalui beberapa gerakannya seperti dengan mengadvokasi pemerintah setempat untuk membuat perangkat kebijakan, semisal FGM dan memberikan dukungan pada bantuan atau program yang dijalankan (UNFPA, 2023). Oleh karenanya, UNFPA berinisiasi untuk mengambil peran di Mesir dalam membantu lembaga atau NGO domestik dalam memerangi FGM. Sejak 2018, UNFPA telah bekerja sama dengan NCW, lembaga nasional Mesir yang berfokus pada perlindungan hak perempuan. Keduanya telah menjalankan beberapa upaya dan program dalam membantu mewujudkan proyeksi Pemerintah Mesir, yakni nol FGM di tahun 2030 sesuai dengan yang tertulis pada *Egypt Vision 2030*. Mengingat tingginya persentase akan praktik tersebut, hal ini turut menjadi fokus utama dalam membentuk kerja sama jangka panjang.

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Hala Yousry – *Deputy Head of Rural Women Committee* di NCW, penulis berhasil mengidentifikasi beberapa faktor pendorong dari maraknya FGM di Mesir serta upaya apa saja yang telah dilakukan kedua aktor tersebut dalam mewujudkan Mesir yang bebas FGM di tahun 2030. Terdapat beberapa upaya UNFPA – NCW dalam membantu proyeksi Pemerintah Mesir untuk menghentikan FGM di Mesir tahun 2030:

1. Program *Religious Leaders' Role in Combating Violence Against Girls* Tahun 2022

Masyarakat Mesir yang konservatif menjadi penyebab dari bertahannya praktik FGM di negara tersebut. Mereka cenderung untuk menghubungkan praktik FGM dengan latar belakang agama, yakni Islam. Islam melalui *surah* di Al-Quran⁶ turut menyatakan akan larangan dari praktik tersebut seperti dilarang untuk memotong bagian tubuh perempuan hanya untuk kepuasan laki-laki (Al-Awa, 2018). Yousry menyatakan bahwa peran dan figur ulama atau *imam* sangat dibutuhkan dalam menghilangkan persepsi yang salah antara Agama Islam dengan FGM.

“...we use (the role of) Sheikh – the head of Masjid (Mosque). We work closely with them especially in this area, because to make people believe that this is not – it has nothing to do with religious background; this is not a religious practice at all.”
(Yousry, wawancara, 30 Oktober 2024)

Di tahun 2022 NCW dan UNFPA melakukan program bernama “Religious Leaders’ Role in Combating Violence Against Girls” bersama dengan pemuka agama dan perwakilan dari Kementerian Wakaf Mesir dan organisasi berbasis keagamaan seperti The Egyptian Family House and the Church (UNFPA, 2022). Program tersebut berisi beberapa agenda, diantaranya orientasi terkait dampak FGM, pendalaman mengenai undang-undang atau hukum FGM, dan bagaimana cara penyampaian laporan terkait praktik FGM. Kapasitas yang dimiliki oleh para pemuka agama dinilai efektif dalam menyebarluaskan ajaran dan pandangan pada komunitasnya (Breakthrough, World Vision, dan UNFPA, 2012). Dari upaya tersebut, perubahan perlahan muncul yang dapat dilihat pada mulai adanya kesadaran pada masyarakat bahwa tidak ada korelasi antara agama manapun dengan praktik FGM

2. Program “Noura”

Praktik FGM di Mesir utamanya menyangkut anak di usia produktif dalam upaya untuk melindungi mereka dari tindakan merugikan, seperti seks sebelum nikah dan menjaga anak perempuan di dalam kesucian dan kebersihan. Masyarakat konservatif melihat “sunat” yang ditujukan baik kepada laki-laki memiliki arti dan tujuan yang sama, yakni suci di hadapan Tuhan dan suci secara rohani. Permasalahan muncul ketika asumsi akan sunat perempuan muncul dan mulai melibatkan sisi kepercayaan (agama). Mereka juga menganggap apabila perempuan tidak disunat, maka ia tidak suci ketika

⁶ Surah tersebut antara lain An-Nisa dan Al-Baqarah

menghadap Tuhan (O'Neill, 2018). Mispresepsi mengenai kesucian perempuan seperti itu yang mendorong dilakukannya praktik FGM di Mesir. Permasalahan yang ada juga dikhawatirkan akan menghambat implementasi visi Mesir untuk menghapus FGM di tahun 2030, yang merupakan salah satu langkah dalam mencapai poin SDGs ke-5, yaitu kesetaraan gender. Menanggapi masalah ini, UNFPA – NCW membentuk program bernama “Noura⁷” di tahun 2021.

“Noura” merupakan salah satu bagian dan inisiasi dari kegiatan pemberdayaan perempuan yang dibentuk oleh Ibu Negara Mesir, Intissar al-Sisi yang diluncurkan bertepatan dengan *El Gouna Film Festival* yang memiliki tema “Investing in Girls for a Bright Future for Egypt” dibawah inisiasi NCW dan *National Council for Childhood and Motherhood* (The Minister of Planning and Economic Development, 2021). Noura juga sejalan dengan *National Strategy for the Empowerment of Egyptian Women 2030*, yang merupakan komponen utama dari *Egypt Vision 2030*. Program ini dibentuk dengan tujuan untuk dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan sosial, sektor kesehatan, dan perekonomian yang baik dalam menunjang segala bantuan yang berkaitan dengan perempuan (NCW dan UNFPA, 2022). Intissar al-Sisi memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan salah satu visi Mesir di tahun 2030 ini. Dukungan tersebut juga dikatakan oleh Yousry melalui wawancara yang telah dilakukan, yang di mana pendekatan yang dilakukan dari program ini adalah melalui dialog dengan perempuan dan anak.

“*Noura, our first lady (Intissar al-Sisi) supporting Noura 100% and come up with the very nice warm kind talk to all the girls and mothers.*” (Yousry, wawancara, 30 Oktober 2024)

Program UNFPA – NCW ini juga menjadi respon dari *the National Strategy for the Empowerment of Egyptian Women (NSEEW) 2030* yang merupakan susunan strategi untuk mencapai *Egypt's Vision 2030* dengan menitikberatkan pada kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. NSEEW turut dibentuk oleh NCW di tahun 2017 dengan berfokus pada empat pilar utama (NCW, 2017), yakni:

A. **Political empowerment and leadership** secara singkat menynggung keterlibatan dan keterwakilan perempuan di kursi politik. Minimnya keikutsertaan perempuan pada sistem politik akan berdampak pada konstitusi dan hukum terkait

⁷ Nama “Noura” diambil dari Bahasa Arab “Noor” yang berarti cahaya. Nama tersebut juga menjadi representasi remaja perempuan Mesir dan juga merupakan personifikasi atas upaya yang dilakukan terkait pemberdayaan perempuan Mesir menuju generasi yang cerah dan lebih baik.

perlindungan perempuan termasuk masalah FGM, sehingga pada pilar pertama mendorong aturan dan perempuan untuk jauh terlibat di sektor publik terlebih dalam mengambil peran di lembaga legislatif.

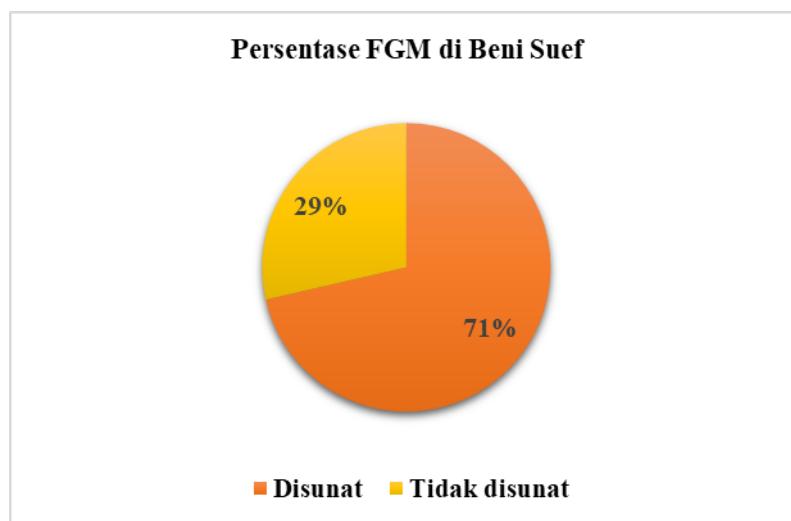
- B. ***Economic empowerment*** dapat dilihat dari muculnya langkah-langkah mencapai kesetaraan dalam cakupan pekerjaan. Hal tersebut berasal dari posisi perempuan yang biasanya di tempatkan pada pekerjaan yang tidak memberikan kesempatan yang sama. Dengan memosisikan aspek ekonomi pada pilar utama, hal ini memengaruhi implementasi kebijakan terkait ketenagakerjaan perempuan Mesir.
- C. ***Social empowerment*** yang ditandai dengan langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan terkait kebutuhan setiap individu. Terdapat beberapa sektor yang dijadikan sebagai hal utama dalam pemberdayaan, di antaranya memperluas akses perempuan pada layanan kesehatan, pemberian dukungan untuk perempuan pada usia produktif (15-65 tahun), perlindungan pada perempuan dalam usia non-produktif (lebih dari 65 tahun) untuk dapat mengakses seluruh layanan masyarakat, serta menitikberatkan pada kesehatan reproduksi perempuan. Kategori tersebut menjadi hal yang akan menjadi tolak ukur dari keberhasilan Pemerintah Mesir terkait *Egypt Vision 2030*.
- D. ***Protection*** yang ditujukan untuk melindungi seluruh perempuan dari kekerasan, melindungi ibu dan anak, dan memberikan perhatian pada perempuan yang membutuhkan; termasuk penyandang disabilitas. Lebih dari 7 juta perempuan Mesir pernah merasakan kekerasan di setiap tahunnya dan pada pilar keempat ini juga mengklasifikasikan jenis kekerasan yang harus segera diselesaikan. Jenis-jenis tersebut meliputi kekerasan domestik dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pernikahan dini, hingga praktik FGM.

Keempat pilar tersebut menjadi landasan dari segala langkah pemerintah Mesir dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan; sesuai dengan visi Mesir 2030.

Beralih pada Noura, program ini menasarkan pada cakupan wilayah inisiasi *Haya Karima* (Kehidupan layak). *Haya Karima* sendiri terbagi atas dua fase, fase 1 dimulai pada tahun 2019 yang pada dasarnya memegang peran penting mengenai langkah awal dalam menciptakan sebuah perubahan. Pada fase ini, pembangunan berfokus pada wilayah *Upper Egypt* atau bagian Hulu Mesir. Dari 75 kota, setidaknya terdapat empat daerah yang menjadikannya sebagai *role model* dalam proyek *Haya Karima* fase 1. Daerah tersebut antara lain, Beni Suef, Luxor, Aswan, dan Sohag. Fase 1 *Haya Karima*

membutuhkan dana sekitar 295 miliar poundsterling Mesir yang kemudian dikelola dalam upaya pengembangan sektor yang memegang peran penting dalam mewujudkan nol FGM di tahun 2030, seperti pendidikan, telekomunikasi, dan pemberdayaan finansial (State Information Service, 2024). Wilayah-wilayah tersebut telah menerima sekitar 68% dari total alokasi dana yang ditandai dengan mengembangkan dan memajukan setidaknya 1000 sekolah serta mengentaskan sekitar 500 ribu penduduk dari buta huruf (Business Today, 2024).

Selanjutnya, fase 2 dari Haya Karima dilanjutkan pada tahun 2023 dengan visi membantu setidaknya 1600 desa dengan perkiraan total penduduk 21 juta jiwa (Egypt Today, 2023). Dalam melancarkan jalannya inisiasi tersebut, UNFPA turut menyediakan *training camp* untuk melatih para mentor dalam meningkatkan pemahaman terkait Noura sebelum program tersebut dijalankan. Mentor yang terlibat berasal dari wilayah kota atau desa yang sama dengan para perempuan yang terlibat di dalam praktik FGM, sehingga hal tersebut menimbulkan rasa aman dan *sense of belonging* dalam menciptakan lingkungan yang mendukung jalannya program (UNFPA, 2022).



Gambar 3.1. Persentase FGM di Beni Suef (Abd-Elhakam, Ibrahim, Mohammed, dan Hassan, 2023)

Adapun data yang tersaji pada gambar 3.1. menjelaskan tingginya kasus FGM di kota Beni Suef. Wilayah tersebut memiliki total penduduk perempuan sekitar 1,7 juta⁸ dan berdasarkan data yang disajikan, kasus FGM di Beni Suef merupakan masalah yang serius. Dengan total kasus FGM yang terbilang cukup tinggi, inisiasi yang terbentuk pada tahun

⁸ Dikutip dari *Central Agency for Public Mobilization Statistic* 2023

2019 ini menyarar daerah tersebut dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui pendekatan dan pengenalan yang ditujukan kepada perempuan di sana. *Haya Karima* cukup memberikan perubahan pada sektor telekomunikasi, edukasi, dan energi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan hingga 100% akan bantuan yang diberikan kepada setidaknya 66 desa di Beni Suef (Egypt Today, 2023). Bantuan tersebut berupa perbaikan pada fasilitas pemuda desa (*youth center*), pembangunan pusat kesehatan, pembangunan jaringan gas alam, dan pembangunan sekolah. Jika melihat pada wilayah Luxor, Aswan, dan Sohag, ketiga wilayah ini cenderung memiliki persentase kasus FGM lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Beni Suef, yakni Luxor (56,7%), Aswan (46,8%), dan Sohag (43,5%) (Kamel, 2023). Sejak dijalankannya inisiasi tersebut, ketiga daerah tersebut mengalami penurunan sebesar 14% di tahun 2021 terkait praktik FGM pada rentang umur 0-19 tahun (Kamel, 2023).

Dr. Hala El-Said yang merupakan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Mesir turut menyatakan bahwa saat ini, Mesir memang memiliki rencana untuk bertransformasi pada segala sektor, termasuk menjadikan pendidikan sebagai basis atau akar yang mampu menjadi kunci utama dalam pembangunan Mesir.

Dalam mempertahankan keberlanjutan dari program Noura, Maya Morsy sebagai ketua NCW dan *partner* kerja samanya, Frederika Meijer sebagai representatif dari UNFPA dan Christine Arab sebagai representatif UN Women kerap memantau progres dari program yang sedang dijalankan. Pemantauan yang dilakukan pada tanggal 17 September 2023 di Assiut ini dilakukan dengan cara diskusi terbuka dengan para perempuan di sana (UNFPA, 2023). NCW dan UNFPA sebagai inisiator program Noura menjalankan program selama 40 minggu yang berfokus pada pelatihan dalam bidang sosial, kesehatan dan ekonomi. Program tersebut berlandaskan pada kurikulum yang ditujukan untuk para perempuan dan anak yang menempati daerah Assiut dan daerah lainnya yang menjadi bagian dari *Haya Karima*.

Dukungan pada program Noura tidak hanya berasal dari aktor dalam negri (domestik) saja. Program Noura berhasil dijalankan atas dukungan dari mitra kerja sama bilateral yang meliputi Kedutaan Besar Belanda di Mesir (*Embassy of the Kingdom of the Netherlands*), Korea International Cooperation Agency, dan Kedutaan Besar Norwegia di Mesir (*Norwegian Embassy*). Adapun bentuk dukungan yang diberikan, yakni berupa dana dan pelatihan yang ditujukan untuk membantu dan melindungi para korban FGM. Bantuan dan dukungan yang diberikan pada program Noura tidak hanya berasal dari kerja sama antar negara yang bersifat bilateral, tetapi juga melibatkan eksistensi dari sektor privat, salah satunya Sawiris Foundation for Social Development dalam memberdayakan perempuan

dalam membangun seluruh sektor sosial yang kemudian dapat menciptakan ruang aman bagi para korban FGM.

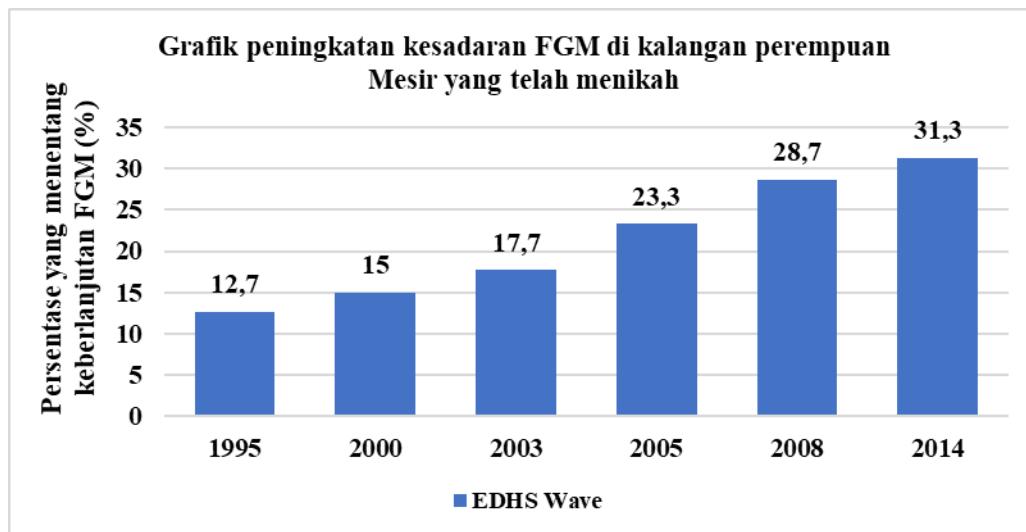
3. Kampanye *Knock on Doors*

UNFPA – NCW cukup aktif dalam mengajak pihak ketiga untuk bergabung di dalam kerja sama keduanya. Berikutnya upaya yang dijalankan antara UNFPA – NCW dalam menghentikan FGM di Mesir adalah dengan melalui kampanye bernama *Knock on Doors* yang dimulai di tahun 2022. Kampanye ini memiliki slogan *Your Right to Live in Safety* yang ditujukan untuk mengedepankan kehidupan yang aman dan terlindungi dari segi fisik dan mental. Sasaran utama dari *Knock on Doors* adalah keluarga (rumah tangga) dengan harapan dapat menekan dan menghilangkan GBV yang merujuk pada perempuan seperti pernikahan dini, kekerasan domestik di dalam rumah tangga, hingga praktik FGM (News Agencies, 2024). Kampanye ini pertama kali dijalankan di Kota Fayoum yang terletak di Mesir Tengah yang kemudian mulai tersebar di enam kota lainnya seperti Assiut, Al-Qusiya, Al-Ghanayem, Abu Tig, Abnoub, dan Sahel Selim. Seperti yang dikatakan oleh Hossam Abbas yang merupakan kepala pada bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Kementerian Kesehatan, kampanye ini juga membutuhkan survei dari para *beneficiary* yang berasal dari masyarakat setempat dalam memonitor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Mesir, terkhusus para perempuan.

Pada saat wawancara, Yousry turut menekankan bahwa pernikahan dini akan menjadi pendorong terjadinya praktik FGM yang juga menjadi inti dari dilakukannya *Knock on Doors*. Menurutnya, pernikahan dini dikhawatirkan dilakukan oleh remaja yang pada dasarnya belum sepenuhnya memiliki pemahaman akan bahaya dan risiko dari FGM. Hal tersebut dikhawatirkan akan mendorong mereka untuk melibatkan anaknya di dalam praktik sunat perempuan.

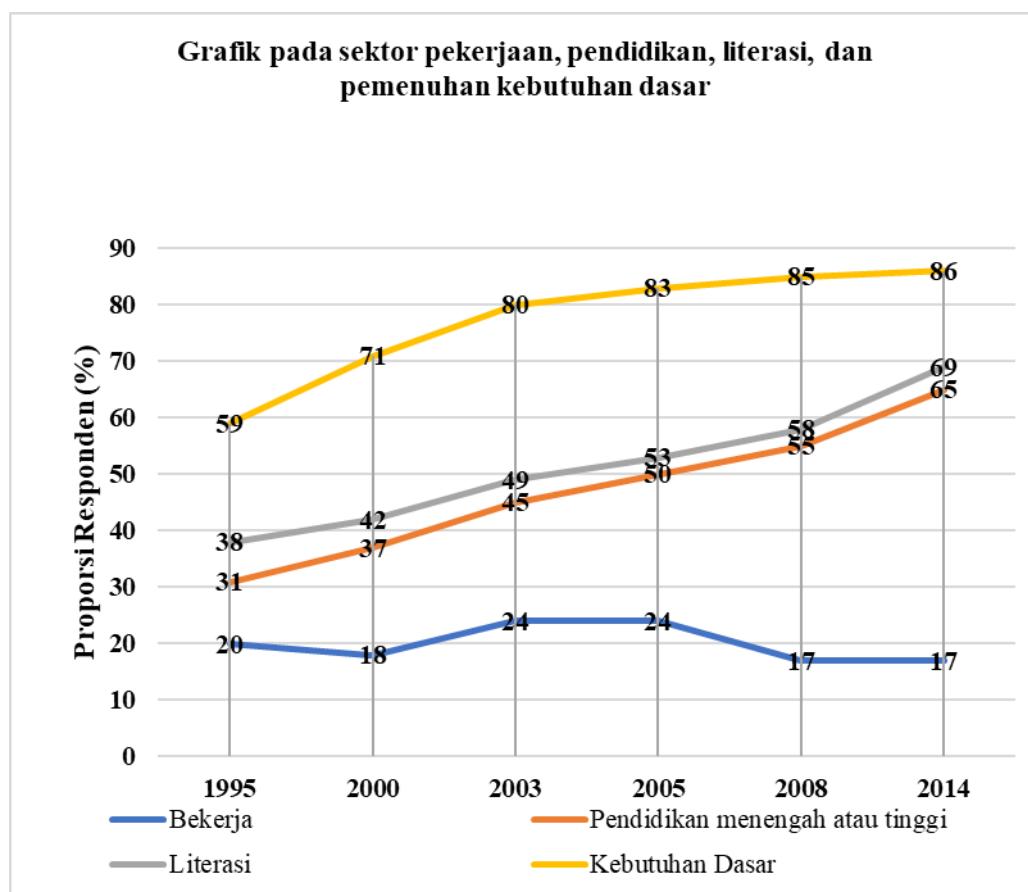
“... ofcourse early marriage is very close to this bad habit.” (Yousry, wawancara, 30 Oktober 2024)

Knock on Doors bertujuan untuk menyebarluaskan terkait peraturan dan tindakan apa saja yang telah dilakukan kepada masyarakat. Melalui langkah ini, para masyarakat menyadari bahwa ada peraturan yang mengatur akan praktik FGM yang secara langsung juga menjadikan praktik tersebut sebagai tindakan kriminal. Adapun peraturan yang dimaksud adalah adanya peningkatan waktu tahanan bagi para pelaku atau praktisi FGM yakni hingga 20 tahun dan terdapat sanksi yang lebih berat yang akan diberikan kepada individu yang meminta untuk dilakukannya praktik ini (Farouk, 2021).



Gambar 3.2. Grafik peningkatan kesadaran FGM di kalangan perempuan Mesir yang telah menikah rentang tahun 1995-2014 (Rossem, Meekers, dan Gage, 2015)

Sejak dimulainya keterlibatan UNFPA di Mesir, terbentuknya NCW, hingga kerja sama yang kemudian dibangun oleh kedua aktor ini, berhasil memberikan perubahan sehingga perempuan lebih berani bersuara terkait keengganannya terkait praktik FGM secara menyeluruh. Bila melihat pada gambar 3.2., dijelaskan mengenai persentase perempuan yang telah menikah dalam menanggapi ketidakberlanjutan dari praktik FGM. Di tahun 1995, lima tahun sebelum dibentuknya NCW, dukungan akan penghentian praktik tersebut masih sangat rendah, yakni sebesar 12,7%. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rossem, Meekers, dan Gage dengan judul *Women's position and attitudes towards female genital mutilation in Egypt: A secondary analysis of the Egypt demographic and health surveys, 1995-2014* (2015) yang turut menjelaskan bahwasannya perempuan dengan latar belakang tidak memiliki pendidikan cenderung menolak akan penyetopan praktik FGM. Terdapat korelasi yang kuat antara pendidikan dengan kesadaran akan praktik FGM (UNICEF Data and Analytics Section, 2022). Individu dengan pola pikir yang terbuka mengenai bahaya FGM cenderung akan menentang keberlanjutan dari praktik tersebut yang kemudian akan memengaruhi cara Mesir dalam mewujudkan visi dan misinya.



Gambar 3. 3. Faktor pendorong persentase awareness perempuan Mesir terhadap FGM
(Rossem, Meekers, dan Gage, 2015)

Gambar 3.3. menjabarkan setidaknya terdapat empat faktor pendorong yang berpengaruh terhadap peningkatan persentase perempuan yang sudah menikah yang mendukung penghentian praktik FGM di Mesir. Faktor-faktor tersebut menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesempatan bekerja, kesempatan belajar di pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dan dalam meningkatkan literasi para perempuan. Dari keempat faktor tersebut, literasi dan pendidikan memiliki peningkatan yang hampir selaras di setiap periodenya. Hal ini menandakan bahwa kedua faktor tersebut saling berkaitan, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menentang FGM serta mendukung segala upaya penghentianya.

Saat ini persentase FGM di Mesir perlahan telah mengalami penurunan. Penurunan tersebut terlihat pada penurunan persentase FGM pada golongan umur 0-19 tahun, yakni yang semula di angka 21% di tahun 2014 menjadi 14% di tahun 2023 (Wahab, 2024). Dari penurunan persentase tersebut dapat dilihat keberhasilan kerja sama antara UFNPA – NCW yang juga didorong oleh dukungan masyarakat Mesir dalam mewujudkan nol FGM di Mesir. Gerakan perempuan Mesir dalam menyelesaikan permasalahan ini terus berkembang seiring berjalannya waktu. Di tahun 2023, Kementerian Solidaritas Sosial Mesir menciptakan kampanye bertajuk “*Female Circumcision is a Crime*” dengan fokus akan keberlanjutan pendidikan, penyetopan pernikahan dini, dan mencegah anak dari praktik FGM (Ministry of Social Solidarity, 2023). Langkah awal yang dibangun oleh feminism liberal telah menjadi permulaan yang baik dalam menciptakan ruang lingkup yang mendukung suara perempuan. Beragam gerakan perempuan, pembentukan NGO, hingga munculnya lembaga yang berfokus pada perempuan menjadikannya sebagai wadah dalam menyuarakan aspirasi para perempuan Mesir dan secara bertahap berhasil dalam mengurangi praktik FGM.

Kerja sama antara UNFPA – NCW dapat dikatakan cukup efisien dalam menciptakan hasil yang efektif dan sejalan dalam membantu Pemerintah Mesir untuk menciptakan Mesir yang bebas FGM di tahun 2030. Merujuk pada peran dari organisasi internasional berdasarkan sudut pandang Barkin, kerja sama antar keduanya dapat dikatakan telah memenuhi setidaknya dua peran utama. Kedua peran tersebut antara lain *Humanitarian Assistance* dan *Human Rights Protector*.

Humanitarian Assistance yang merujuk pada penyaluran segala bentuk bantuan kepada masyarakat Mesir terkhusus para perempuan yang mendiami wilayah Hulu Mesir; yang juga menjadi daerah dengan persentase FGM tinggi. Pembangunan sarana dan prasarana publik menjadi salah satu poin penting dari kerja sama yang dibentuk keduanya. Peran ini juga menjadi tren yang turut ditekankan oleh UN dan badan dibawahnya yang lebih mengutamakan keamanan manusia (*human security*) daripada keamanan internasional yang cenderung bergantung pada senjata (Barkin, 2006). Terlibatnya UNFPA di wilayah Mesir dalam memberikan bantuan tidak dapat dikatakan sebagai bentuk dari sebuah intervensi. Hal ini karena ada persetujuan dari pemerintah setempat. Dalam mempertahankan seluruh upaya untuk mencapai kesetaraan gender, termasuk menghilangkan praktik FGM di Mesir, melalui Humanitarian Action Overview (HAO) tahun 2023, UNFPA telah menyusun perencanaan pemberian bantuan dana sebesar \$11 juta dolar AS dengan fokus memastikan layanan kesehatan yang memadai (UNFPA, 2023). Hasil dari perencanaan tersebut telah meningkatkan kualitas hidup para perempuan di berbagai negara, termasuk Mesir.

Human Rights Protector dapat dilihat bagaimana kedua aktor tersebut bersama-sama melindungi dan mendapatkan kembali hak hidup para perempuan Mesir yang terampas akibat maraknya kekerasan berbasis gender, termasuk praktik FGM. Hukum terkait FGM nyatanya telah ditetapkan di Mesir pada tahun 2008 tentang masa tahanan dan penetapan FGM sebagai tindakan kriminal. Pada faktanya, pengesahan hukum tersebut tidak mampu menjadi landasan yang kuat dalam memberantas FGM. Melihat hal ini, UNFPA hadir untuk menyebarluaskan langkah-langkah yang berpotensi menekan serta menghilangkan praktik tersebut di Mesir, seperti melalui proyek dan kampanye. Dengan maraknya praktik FGM turut membuat organisasi tersebut memastikan *Minimum Initial Service Package* (MISP) atau layanan dasar mengenai kesehatan reproduksi dapat diakses oleh seluruh masyarakat (UNFPA, 2023). Hal ini dilakukan dengan tujuan memastikan seluruh perempuan Mesir memiliki hak yang sama dalam mengakses sarana publik terlebih dalam hal kesehatan reproduksi.

Peran dan upaya yang dilakukan tidak akan berhasil tanpa adanya dorongan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat. Di tahun 2021, Pemerintah Mesir mengamandemen Undang-Undang anak no. 126 tahun 2008 mengenai lamanya masa tahanan bagi para pelaku FGM. Perubahan aturan tersebut menekankan pada dampak yang ditimbulkan oleh pelaku saat menjalankan praktik FGM. Pelaku praktik FGM akan menjalankan masa tahanan paling singkat lima tahun, tetapi apabila korban mengalami cacat, masa tahanan paling singkat tujuh tahun, apabila korban meninggal, masa tahanan paling singkat 10 tahun, dan apabila dokter

atau tenaga profesional menjalankan praktik FGM, akan mendapatkan masa tahanan hingga 20 tahun (Egypt Peace for Development and Human Rights Association, 2024). Perubahan terkait masa tahanan diharapkan mampu secara efektif terimplementasi dan mampu mencegah individu yang ingin melakukan praktik sunat perempuan.

Sektor kesehatan yang menjadi urgensi utama dari kerja sama telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan bertambahnya beberapa layanan kesehatan. Dengan melihat dampak baik jangka pendek ataupun panjang dari praktik FGM, UNFPA dan NCW mengarahkan para perempuan untuk mengandalkan dokter dan perawat profesional dalam menangani kesehatan reproduksi dan dampak akibat FGM. Di tahun 2023, UNFPA – NCW bersama Al-Azhar University membentuk *Safe Women Clinic* yang memiliki layanan penuh terkait FGM dimulai dari pengobatan hingga bantuan hukum yang terkoordinir oleh NCW. *Safe Women Clinic* juga menyediakan pelatihan yang merujuk pada standar UNFPA dan WHO dalam merespon masalah FGM (UNFPA, 2023). Tidak hanya itu, layanan kesehatan dan kelompok masyarakat juga harus membentuk ruang lingkup yang aman dan nyaman bagi para korban FGM guna menekan tingkat stres imbas dari praktik tersebut. Adapun tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana upaya ini dapat merata di seluruh layanan kesehatan di Mesir dan memastikan seluruh tenaga medis memiliki visi dan misi yang sama untuk tidak lagi terlibat di dalam FGM.

Sejauh ini, kerja sama yang dilakukan kedua aktor lebih menyasar kelompok masyarakat golongan muda seperti para pelajar dan mahasiswa serta komunitas pemuda. Meskipun langkah dasar dalam upaya penghapusan FGM telah dibentuk, terdapat beberapa tantangan yang menghambat penghentian FGM seperti salah satunya penerapan hukum yang tidak maksimal. Oleh karenanya, pemerintah dengan mitra kerja samanya – UNFPA dan NCW terus mengkaji dan menyusun strategi dalam mencapai Mesir nol FGM di tahun 2030. Program kerja sama yang dilakukan oleh UNFPA – NCW umumnya dilakukan beriringan dengan perayaan 16 hari anti GBV yang di mana dirayakan dari tanggal 25 November yang merupakan hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan, hingga 10 Desember yang juga bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia. Periode tersebut juga menjadi peluang untuk tersebarnya kampanye-kampanye yang bersifat akar rumput.

SIMPULAN

FGM merupakan praktik yang marak terjadi di Mesir dan sudah mengakar hingga menjadi sebuah tradisi. Praktik tersebut di dorong oleh banyak faktor, tradisi, sistem sosial patriarki, dan minimnya pengetahuan terkait FGM sehingga praktik tersebut masih dilakukan. Faktor pendorong tersebut juga menjadi bukti nyata adanya perampasan hak dari para perempuan Mesir seperti hak hidup, hak mendapatkan layanan sosial yang memadai, hingga hak atas tubuhnya sendiri. Dari banyaknya kasus dan lamanya durasi FGM di Mesir, hal ini membuat UNFPA turut hadir dalam membantu NCW, sebagai lembaga nasional yang melindungi perempuan, untuk menenangkan dan mewujudkan nol FGM di tahun 2030.

Kerja sama antara UNFPA – NCW terimplementasi pada beberapa program yang dijalankan, seperti program *Religious Leaders' Role in Combating Violence Against Girls* di tahun 2022, program Noura yang dibentuk pada tahun 2021 atas inisiasi Ibu Negara Intisaar al-Sisi, dan terakhir adalah melalui kampanye *Knock on Doors* yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang aman dan terlindungi dari segi fisik dan mental pada perempuan. Kerja sama keduanya turut dilihat dari setidaknya dua landasan teori, yakni teori feminism liberal yang merujuk pada sudut pandang Naomi Wolf dan teori hubungan internasional yang merujuk pada sudut pandang Barkin. Dengan melihat isu FGM melalui kacamata feminism liberal, hal tersebut secara jelas memberikan gambaran perjuangan perempuan Mesir, seperti gerakan feminism dari kalangan masyarakat, pembentukan NGO sebagai wadah dalam menciptakan perubahan, hingga pembentukan NCW sebagai lembaga negara yang melindungi perempuan dan anak dalam mendapatkan kembali haknya.

Selanjutnya, dengan mengkaji kerja sama antara UNFPA – NCW melalui teori organisasi internasional, hal ini telah menunjukkan adanya potensi untuk mewujudkan Mesir yang bebas FGM di tahun 2030. Terdapat penurunan kasus FGM dari adanya kemitraan yang kuat antar keduanya. Keberhasilan tersebut turut ditinjau dari setidaknya dua peran utama sebuah organisasi internasional yakni sebagai *humanitarian assistance* dan *human rights protector*. Dari upaya yang dijalankan juga tidak luput dari dukungan masyarakat setempat yang berkomitmen untuk menciptakan perlindungan dan hidup yang sejahtera untuk seluruh perempuan Mesir. Selain itu, mereka juga merayakan anti kekerasan berbasis gender selama setidaknya 16 hari yang diberi nama *16 Days of Activism against Gender Based Violence* yang mampu meningkatkan kembali kesadaran masyarakat Mesir untuk terus menanamkan visi Mesir, yakni *zero FGM in 2030*.

Dengan dilakukannya penelitian terkait upaya UNFPA – NCW dalam membantu proyeksi Pemerintah Mesir untuk menghentikan FGM di Mesir tahun 2030, penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. UNFPA – NCW bersama dengan Pemerintah Mesir untuk dapat terus mempertahankan langkah baik yang telah dijalankan dan mempertahankan pembahasan mengenai dampak terkait FGM di sekolah dasar hingga menengah ke atas.
2. Menguatkan dan menegakkan hukum terkait FGM dan memastikan seluruh perempuan mendapatkan perlindungan yang sama.

Daftar Pustaka

- 28 Too Many. (2017). *Country Profile: FGM in Egypt*. Egypt: 28 Too Many.
- 28 Too Many. (2021). *FGM in Djibouti: Short Report*. 28 Too Many.
- 28 Too Many. (2021). *FGM in Somalia and Somaliland*. 28 Too Many.
- Al-Awa, M. S. (2018). *FGM In The Context Of Islam*. Cairo: The National Council for Childhood and Motherhood.
- Almeder, R. (1994). *Liberal Feminism and Academic Feminism*. University of Illinois Press.
- Amin, T. T., Moety, A. M., & Sabry, H. A. (2017). Female genital mutilation: Egypt in focus. *European Journal of Forensic Sciences*, 24.
- Aydin, G. (2016). Feminist Challenge to the Mainstream IR. *European Journal of Multidisciplinary Studies*, 62-69.
- Barkin, J. S. (2006). *International Organization: Theories and Institution*. New York: Palgrave Macmillan.
- Becker, M. (1999). Patriarchy and Inequality: Towards a Substantive Feminism. *University of Chicago Legal Forum*, 21-40.
- Berg, R. C., & Denison, E. (2012). Interventions to reduce the prevalence of female genital mutilation / cutting in African countries. *Campbell Systematic Reviews*.
- Boyle, E. H., & Preves, S. E. (2000). National Politics as International Process: The Case of Anti-Female-Genital-Cutting Laws. *Journal of the Law and Society Association*, 703-737.
- Breakthrough, World Vision, dan UNFPA. (2012). *A Mapping of Faith-based Responses to Violence against Women and Girls in the Asia-Pacific Region*. UNFPA.
- Brown, S. (1988). *Feminism, International Theory, and International Relations of Gender Inequality*. SAGE.
- Business Today. (2024, December 8). *First phase of 'Haya Karima' initiative costs EGP 295.5B*. From [businessstodayegypt.com](https://www.businessstodayegypt.com/Article/1/5650/First-phase-of-Haya-Karima-initiative-costs-EGP-295-5B): <https://www.businessstodayegypt.com/Article/1/5650/First-phase-of-Haya-Karima-initiative-costs-EGP-295-5B>
- Caughey, P. L. (2010). Introduction: theorizing the 'first wave' globally. *Palgrave Macmillan Journals*, 5-9.
- Cottais, C. (2020). *Liberal Feminism*. Institut du Genre en Géopolitique.
- Creswell, J. W. (2018). Qualitative Methods. In J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (pp. 292-335). USA: SAGE.

- 22 Rusdi J. Abbas; Viraya A. Khairina | Kerja Sama United Nations Fund for Population Activity dan The National Council for Women Terkait Proyeksi Pemerintah Mesir Dalam Menghentikan Female Genital Mutilation di Tahun 2030
- Duvvury, N., Marcos, M. O., Gadallah, M., Attia, S., Adly, N. E., Maged, W., & Haddad, G. (2015). *THE EGYPT ECONOMIC COST OF GENDER-BASED VIOLENCE SURVEY (ECGBVS) 2015*. Central Agency for Public Mobilization and Statistics, NCW, UNFPA.
- Egypt Health Issues Survey, El-Zanaty and Associates, dan ICF International. (2015). *Egypt Health Issues Survey 2015*. Cairo and Rockville: Ministry of Health and Population and ICF International.
- Egypt Peace for Development and Human Rights Association. (2024). *Report of "Egypt Peace Association" to the Committee on the Rights of the Child*. Qalyubia: Egypt Peace for Development and Human Rights Association.
- Egypt Today. (2023, September 15). 'Suds Al Omaraa' village in Beni Suef witness huge developments per president Sisi directives. From egypttoday.com: <https://www.egypttoday.com/Article/1/126986/%E2%80%99Suds-Al-Omaraa%E2%80%99-village-in-Beni-Suef-witness-huge-developments>
- Egypt Today. (2023, May 31). 2nd phase of Haya Karima covers 1,600 villages with a population of 21 million. From egypttoday.com: <https://www.egypttoday.com/Article/1/124762/2nd-phase-of-Haya-Karima-covers-1-600-villages-with>
- EL, G. (2019). The Challenge of Female Genital Mutilation. *Scientific Journal of Research and Reviews*.
- Fahmy, A., El-Mouelhy, M. T., & Ragab, A. R. (2010). Female genital mutilation/cutting and issues of sexuality in Egypt. *Reproductive Health Matters*, 181-190.
- Family Health International. (2009). *Meeting Adolescent Reproductive Health Needs in Egypt*. Egypt: Family Health International.
- Farouk, M. A. (2021, January 21). *Egypt's cabinet toughens law banning female genital mutilation*. From reuters.com: <https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/egypts-cabinet-toughens-law-banning-female-genital-mutilation-idUSL8N2JW26Z/>
- Hodgson-Wright, S. (2006). Early Feminism. In S. Gamble, *THE ROUTLEDGE COMPANION TO FEMINISM AND POSTFEMINISM*. London and New York: Routledge.
- Iannello, K. (2010). Women's Leadership and Third-Wave Feminism. *Sage Publication*, 70-77.
- Ibrahim, S., & Tiwari, M. (2014). The Dynamics of Collective Agency in Practice: Women's Fight against FGM in Upper Egypt. In S. Ibrahim, *The Capability Approach: From Theory to Practice* (pp. 52-72). Palgrave Mcmillan.
- Kamel, E. (2023, March 20). *Statistics: Female circumcision rate drops to 14.2%, Luxor, Aswan and Sohag have highest rates*. From vetogate.com: <https://www.vetogate.com/4839628>
- Khodary, Y., & Hamdy, N. (2019). FGM in Egypt between socio-cultural barriers and lack of political will. *Journal of Aggression, Conflict, and Peace Research*, 252-262.
- Koigi, B. (2023, November 6). *Egypt sets an example for nations with rural-urban development gaps*. From fairplanet.org: <https://www.fairplanet.org/editors-pick/egypt-sets-an-example-for-nations-with-rural-urban-development-gaps/>
- Llamas, J. (2017). Female Circumcision: . 1-6.
- Magdy, R. (2017, March 8). *Egyptian feminist movement: a brief history*. From opendemocracy.net: https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/egyptian-feminist-movement-brief-history/#_ftn1
- Ministry of Social Solidarity. (2023, February 6). *Al-Qabbaj launches the "Female Circumcision is a Crime" campaign. The campaign is implemented by the*

- “Awareness for Community Development” program during the month of February and extends until mid-March.* From moss.gov.eg: <https://www.moss.gov.eg/Sites/MOSA/ar-eg/Pages/news-details.aspx?nid=2812>
- Mohajan, H. K. (2022). Four Waves of Feminism: A Blessing for Global Humanity. *Munich Personal RePEC Archive*, 1-8.
- National Council for Women. (2020). *Rights of Persons With Disabilities*. Cairo: National Council for Women.
- NCW dan UNFPA. (2022). *NOURA*. NCW dan UNFPA.
- News Agencies. (2024, November 25). *NCW Launches “Knock on Doors” Campaign with Focus on Women’s Safety*. From top50women.com: <https://top50women.com/ncw-launches-knock-on-doors-campaign-with-focus-on-womens-safety/>
- Omar, M. M., & Taha, A. M. (2021). Contributions of the National Council for Women in Promoting the Political Empowerment of Egyptian Women. *Egyptian Journal of Social Work (EJSW)*, 149-172.
- O'Neill, S. (2018). Purity, cleanliness, and smell: female circumcision, embodiment, and discourses among midwives and excisers in Fouta Toro, Senegal. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 1-19.
- Rossem, R. V., Meekers, D., & Gage, A. J. (2015). Women's position and attitudes towards female genital mutilation in Egypt: A secondary analysis of the Egypt demographic and health surveys, 1995-2014. *BMC Public Health*, 1-13.
- State Information Service. (2024, December 9). *Egypt implemented 1st phase of Haya Karima initiative at 85.5%*. From sis.gov.eg: <https://www.sis.gov.eg/Story/202512/Egypt-implemented-1st-phase-of-Haya-Karima-initiative-at-85.5%25?lang=en-us>
- Tag-Eldin, M. A., Gadallah, M. A., & Al-Tayeb, M. N. (2008). Prevalence of female genital cutting among Egyptian girls. *Bull World Health Organ*, 269-274.
- The Minister of Planning and Economic Development. (2021, October 17). *The Minister of Planning and Economic Development participates in the launching ceremony of the “Noura Initiative”*. From mped.gov.eg: <https://mped.gov.eg/singlenews?id=754&lang=en>
- UN Women. (2018). *PROFILE OF WOMEN IN RURAL EGYPT*. Cairo: UN Women.
- UN Women. (2021, February 5). *As more families report FGM incidents in Egypt, advocacy intensifies, and a new bill seeks to increase penalties*. From unwomen.org: <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/2/feature--families-report-fgm-in-egypt-and-advocacy-intensifies>
- UNFPA - UNICEF. (2023). *Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation: Delivering the Global Promise to End FGM by 2030*. UNFPA - UNICEF.
- UNFPA & UNICEF. (2020). *MEASURING EFFECTIVENESS OF FEMALE GENITAL MUTILATION ELIMINATION: A COMPENDIUM OF INDICATORS*. New York: UNFPA & UNICEF.
- UNFPA. (2020). *COSTING THE THREE TRANSFORMATIVE RESULTS*. New York: UNFPA.
- UNFPA. (2022, November 30). *Religious leaders trained on combatting FGM, other forms of violence against women and girls*. From egypt.unfpa.org: <https://egypt.unfpa.org/en/news/religious-leaders-trained-combatting-fgm-other-forms-violence-against-women-and-girls>
- UNFPA. (2022, December 26). *Training camp equips Noura mentors with leadership skills*. From egypt.unfpa.org: <https://egypt.unfpa.org/en/news/training-camp-equips-noura-mentors-leadership-skills>

- 24 Rusdi J. Abbas; Viraya A. Khairina | Kerja Sama United Nations Fund for Population Activity dan The National Council for Women Terkait Proyeksi Pemerintah Mesir Dalam Menghentikan Female Genital Mutilation di Tahun 2030
- UNFPA. (2023, July 6). *Gender Equality*. From [unfpa.org: https://www.unfpa.org/gender-equality#readmore-expand](https://www.unfpa.org/gender-equality#readmore-expand)
- UNFPA. (2023). *Humanitarian Action: 2024 Overview*. UNFPA.
- UNFPA. (2023, September 18). *UNFPA, NCW follow up on progress of Noura Framework in Assiut*. From [egypt.unfpa.org: https://egypt.unfpa.org/en/news/unfpa-ncw-follow-progress-noura-framework-assiut](https://egypt.unfpa.org/en/news/unfpa-ncw-follow-progress-noura-framework-assiut)
- UNFPA. (2023, Agustus). *UNFPA: About Us*. From [unfpa.org: https://www.unfpa.org/about-us](https://www.unfpa.org/about-us)
- UNFPA. (2024). *Female Genital Mutilation*. From [egypt.unfpa.org: https://egypt.unfpa.org/en/topics/female-genital-mutilation-5](https://egypt.unfpa.org/en/topics/female-genital-mutilation-5)
- UNFPA. (2024, Maret 5). *NCW, Ministry of International Cooperation, UNFPA and Norway launch new project*. From [egypt.unfpa.org: https://egypt.unfpa.org/en/news/ncw-ministry-international-cooperation-unfpa-and-norway-launch-new-project](https://egypt.unfpa.org/en/news/ncw-ministry-international-cooperation-unfpa-and-norway-launch-new-project)
- UNFPA Egypt. (2022, December 9). *National Committee for the Eradication of FGM holds eighth meeting*. From [egypt.unfpa.org: https://egypt.unfpa.org/en/news/national-committee-eradication-fgm-holds-eighth-meeting](https://egypt.unfpa.org/en/news/national-committee-eradication-fgm-holds-eighth-meeting)
- United Nations. (2022). *The Sustainable Development Goals Report*. UN.
- Wahab, K. A. (2024, July 20). *With UN support, entrepreneurship combats female genital mutilation in Upper Egypt*. From [news.un.org: https://news.un.org/ar/story/2024/07/1132516#:~:text=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF,2014%20%D8%A5%D9%84%D9%89%2014%25%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%202023](https://news.un.org/ar/story/2024/07/1132516#:~:text=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF,2014%20%D8%A5%D9%84%D9%89%2014%25%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%202023).
- Wang, L. (2010). The Second Wave. *California Sociology Journal*, 31-36.
- Weny, K., Silva, R., Snow, R., Legesse, B., & Diop, N. (2020). Towards the elimination of FGM by 2030: A statistical assessment. *PLoS ONE*.
- WHO. (2023, Januari 31). *who.int*. From Female Genital Mutilation: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>
- WHO. (2024, Februari 5). *Female genital mutilation*. From [who.int: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation#:~:text=In%202008%2C%20the%20World%20Health,finance%2C%20justice%20and%20women's%20affairs](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation#:~:text=In%202008%2C%20the%20World%20Health,finance%2C%20justice%20and%20women's%20affairs)
- Wilfong, T. G. (2010). Gender in Ancient Egypt. In W. Wendrich, *Egyptian Archaeology* (pp. 164-179). Malden, Massachusetts: Wiley-Blackwell.
- Wolf, N. (2002). *Mitos Kecantikan*. New York: Perennial.
- Wolf, N. (2002). *Mitos Kecantikan*. New York: Perennial.